Nama : Talista Auriella Haliana

Nim : A11.2022.14495

Kelompok : A11.43UG1

UTS Pendidikan Kewarganegaraan

**9. Jelaskan bagaimana terjadinya Apatride dan Bipatride, sertai contoh**

Jawab : Apatride adalah istilah untuk seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan seseorang tersebut tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun. Hal ini dapat terjadi karena ketika seseorang lahir di negara penganut asas Ius Sanguinis namun orang tuanya berasal dari negara penganut asas Ius Soli. Contoh kasus Apatride ialah, ketika seseorang lahir di negara Amerika Serikat yang menganut asas Ius Soli, tetapi kedua orang tuanya berasal dari negara Inggris yang menganut asas Ius Sanguinis, hal ini menjadikan ornag tersebut tidak memiliki kewarganegaraan manapun. Bipatride adalah istilah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan, hal ini terjadi jika seseorang lahir di negara penganut asas Ius Soli, sedangkan orang tuanya berasal dari negara penganut asas Ius Sanguinis, maka orang tersebut akan menjadi bipatride. Contoh kasus Bipatride, kasus kewarganegaraan Irfan Bachdim, Ia memilliki kewarganegaraan Indonesia dari ayahnya yang WNI, dan mempunyai kewarganegaraan Belanda dari tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Namun pada akhirnya sesuai undang-undang di Indonesia, kewarganegaraan seseorang yang berkewarganegaraan ganda bisa diputuskan paling lambat 3 tahun setelah ia menginjak usia 18 tahun, sehingga Irfan memilih untuk menjadi WNI sebelum usianya lebih dari 21 tahun.

**8. Demokrasi memerlukan partisipasi aktif warga Negara dalam pelaksanaannya. Tidak ada satupun Negara di dunia yang mencapai puncak kejayaannya jika tidak ada partisipasi warganegaranya. Jelaskan dan berikan contoh partisipasi warga Negara terhadap negaranya!**

Jawab : Partisipasi warga negara merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem demokrasi yang mengutamakan kekuasaan rakyat. Tanpa partisipasi aktif warga negara, demokrasi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Beberapa cara pastisipasi warga negara terhadap negarannya ialah 1) Pemilihan Umum. Salah satu bentuk partisipasi paling mendasar adalah pemilihan umum. Warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan perwakilan mereka, seperti presiden, anggota parlemen, dan pejabat pemerintahan lainnya. Dalam UUD Tahun 1945 dicantumkan ketentuan mengenai pemilihan umum dan hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Contohnya Pemilu Presiden, Pemilihan Anggota legislative. 2) Aktif dalam kegiatan Politik. Warga negara berperan aktif dalam politik dengan menjadi anggota partai polotik, menghadiri pertemuan partai, atau bahkan mencalonkan diri sebagai calon politik. 3) Protes dan Demonstrasi. Ketidakpuasaan warga negara terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah, mereka dapat memprotes dan melakukan demonstrasi untuk mengecam kebijakan pemerintah tersebut.

**6. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi menurut Winataputra dan Budimansyah (2007:4) dengan merumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga Negara. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!**

Jawab : Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran yang penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran akan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan dalam proses penyampaian nilai-nilainya menanungi banyak hal, termasuk di dalamnya mendidik para generasi muda dengan memberikan pemahaman-pemahaman terhadap nilai-nilai kewarganegaraan, dengan menghubungkannya pada setiap proses pendidikan sehingga tercapainya penyiapan generasi muda yang kedepannya bertindak atas dasar paham kewaraganegaraan, sehingga para generasi muda dapat bertanggung jawab sebagai warga negara. Misalnya sadar akan bela negara dan cinta tanah air bentuk nyatanya bagi kaum pelajar adalah belajar dengan baik. Pendidikan ini juga bertujuan agar mahasiswa memahami nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, serta etika dan norma-norma yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat yang berdampingan secara damai. Dengan demikian, perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam membentuk warga negara yang sadar dan aktif dalam menjaga dan memperkuat demokrasi serta membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

**5. Bagaimana hubungan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara yang tidak bisa dipisahkan? Jelaskanlah beserta contoh !**

Jawab : Hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang berbeda namun saling terkait satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Sementara hak adalah sesuatu yang kita miliki, wewenang atas sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hak akan terlaksana apabila kewajiban sudah dilaksanakan. Kewajiban dan hak negara serta warga negara adalah dua konsep yang saling terkait dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena mereka menciptakan keseimbangan dan tanggung jawab dalam hubungan antara pemerintah dan warga negara. Hak dan kewajiban negara dan warga negara memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang mendapatkan haknya karena telah memenuhi kewajibannya. Selain itu, hak dan kewajiban warga negara juga tidak bisa dipisahkan karena dari kewajiban muncul hak-hak dan sebaliknya. Contoh kewajiban warga negara di Indonesia adalah membayar pajak dan retribusi sesuai yang diatur oleh pemerintah pusat ataupun daerah, tunduk akan pembatasan hak kebebasan, dan kewajiban saling menghargai sesama warga negara.

**2. Salah satu alasan perlunya identitas nasional bagi Indonesia yaitu agar bangsa indonesia tetap bersatu dalam menjaga nilai persatuan sesuai dengan ideologi/dasar negara indonesia. Tetapi salah satu dinamika yang terjadi sekarang ini warga negara indonesia tidak lagi menjadikan pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku hidupnya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga merusak nilai persatuan. Jelaskan beserta contoh bagaimana kedudukan konsep ideologi negara indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi !**

Jawab : Kedudukan konsep ideology negara Indonesia, yakni Pancasila, dalam menghadapi dinamika yang terjadi saat ini adalah tantangan dan peluang. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memuat nilai-nilai yang menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dinamika sosial, budaya, politik, dan ekonomi dapat memengaruhi cara warga negara Indonesia memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contohnya 1) Kemajemukan Agama dan Kebudayaan, Indonesia memiliki keragaman agama, suku, budaya, dan tradisi yang kaya. Meskipun Pancasila mempromosikan toleransi dan keragaman, beberapa kelompok masyarakat mungkin cenderung mengidentifikasi diri mereka lebih dengan identitas agama atau etnis tertentu daripada dengan identitas nasional. Ini bisa mengakibatkan ketidaksetujuan dan konflik. Bukti nyatanya yakni konflik antaragama atau antarsuku yang terkadang mempengaruhi persatuan dan menciptakan ketegangan sosial. 2) Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ini dapat merongrong nilai persatuan jika warga merasa bahwa sistem tidak adil. Contohnya, Protes sosial dan demonstrasi yang terjadi sebagai reaksi terhadap ketidaksetaraan ekonomi. 3) Peran Pemerintah dan Otoritarianisme: Beberapa dinamika politik saat ini menyoroti peran pemerintah dan isu otoritarianisme. Pancasila menegaskan asas demokrasi, dan pergeseran menuju pemerintahan otoriter atau langkah-langkah yang membatasi kebebasan sipil mungkin tidak sejalan dengan ideologi negara. Contohnya, Pembatasan kebebasan pers, penindakan oposisi politik, atau pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang mungkin menantang prinsip-prinsip Pancasila.